

# FAKTOR MUNCULNYA GERAKAN PRO DEMOKRASI DI MYANMAR

Oleh : Ritayanti

Jurusan Hubungan Internasional

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email : [eastern\\_sweet@fisipol.umy.ac.id](mailto:eastern_sweet@fisipol.umy.ac.id)/[ritayanti84@gmail.com](mailto:ritayanti84@gmail.com)

## Abstrak

*The first encouraging mass movements that headed by the young monks who did not have political expression of its own, then looking for through the leadership of Aung San Suu Kyi who has built a moral authority to appear as a "leader" of the mass movement house arrest for years. Yet the reality, Aung San Suu Kyi and the NLD not a party to organize this movement. The movement is is a reaction to suffering people.*

*Key Word : Politics system, pro democracy, Aung San Suu Kyi, Myanmar, international, domestic, movement.*

## PENDAHULUAN

Gerakan pro demokrasi datang dari berbagai macam kelompok yang menginginkan pemerintahan otoriter junta militer segera berakhir. *Pertama*, kelompok agamawan (sangha Buddha/biksu) yang dikenal dengan istilah *monastic order*. Semua orang percaya bahwa tentara tidak akan berani bertindak keras terhadap biksu, namun pada 20 oktober 1990 dibawah perintah jenderal Sauw Maung memerintahkan pembekuan semua organisasi Buddha yang berhubungan dengan gerakan pro demokrasi

Demokrasi di Myanmar menjadi sorotan dunia internasional ketika pada tanggal 1 April 2012, pemerintahan junta militer menyelenggarakan pemilu yang bebas dan adil. Keberhasilan Myanmar dalam menyelenggarakan pemilu telah menjadi era baru perubahan yang terjadi di dalam negeri Myanmar. Perubahan positif tidak hanya ditujukan oleh rakyat Myanmar namun juga seluruh

masyarakat internasional yang dulu menekan Myanmar akibat pelanggaran hak asasi manusia dan demokrasi. Pada dasarnya demokratisasi ini telah dimulai sejak pemerintah merencanakan konstitusi baru 2008, sampai dengan kemenangan Thein Sein sebagai presiden pada 2010. Sejak kepemimpinan Thein Sein ini banyak perubahan baru yang mengarah pada demokrasi, seperti dilaksanakannya genjatan senjata, perbaikan ekonomi, pembebasan tahanan politik, kebebasan media masa, pemilu yang adil dan jujur samapi dengan pengambilan fungsi parlemen. Pemerintahan Thein Sein di nilai membawa berbagai perubahan positif yang di capai pasca pemilu 2010. Semakin baik demokrasi di satu negara disebabkan karena menguatnya gerakan pro demokrasi. Gerakan pro demokrasi bisa menjadi kuat karena :

### **Adanya Tekanan Domestik**

Myanmar merupakan negara yang masuk dalam kategori miskin, meskipun negara ini memiliki sumber daya alam yang begitu luas. (Potter, 2000) Beberapa upaya eksploitasi sumber daya berkelanjutan telah menambah tantangan pembangunan negara dan hasil degradasi lingkungan yang parah, terutama dalam bentuk menurunnya kualitas tanah akibat penggunaan berlebihan atau penyalahgunaan tanah, dan di perparah oleh deforestasi yang meluas. Tingkat deforestasi Myanmar merupakan salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara ( 1,4% pa ). Hal yang terpenting, hutan kayu negara itu sedang dibersihkan untuk mendapatkan mata uang asing baik untuk militer dan kelompok-kelompok etnis, dengan sedikit perhatian untuk pelastarian jangka panjang dari sumber daya yang berharga atau efek konsekuen pada eko-sistem. Hal tersebut merupakan salah satu indicator yang memperparah perekonomian dalam negeri.

Perekonomian Myanmar bisa dikatakan sangat terbelakang dengan tingkat kemiskinan rakyat yang tinggi. Dan setelah aksi demonstrasi besar-besaran di tahun 1988, yang kemudian diikuti dengan penolakan hasil pemilu 1990, bantuan dan investasi asing mongering. Pada tahun 2003, tekanan ekonomi asing menjadi semakin gencar setelah rezim militer ini menyerang konvoi Aung San Suu Kyi. Pemerintah Amerika menjatuhkan embargo ekonomi terhadap Myanmar.

Disamping itu, krisis ekonomi muncul akibat dilakukannya usaha ekonomi ilegal yang didasarkan pada penyelundupan narkoba, (Steinberg, Burma, 2010) batu bara, dan kayu. Perdagangan gelap ini telah menopang kelompok-kelompok bersenjata, di antaranya kelompok etnis minoritas, serta pemerintah Myanmar.

Berdasarkan laporan UNDP tahun 2007, sekiranya dapat menunjukkan terkait kontribusi untuk masing-masing wilayah miskin yang perhitungan baik kejadian atau indikator-indikator terjadinya kemiskinan, dan juga berat populasi dari masing-masing wilayah tersebut. wilayah yang berkontribusi paling besar terhadap kemiskinan adalah Mandalay (5,7%), daerah Ayeryawaddy (4,2%), Sagaing (3,7%). Begitu pula dengan daerah Kachin, Chin, dan Shan Timur. (UNDP, 2009)

Pada tahun 2009 UNDP juga mengeluarkan data pembangunan bagi negara-negara ASEAN. Sebuah penilaian dari lembaga internasional tersebut telah cukup menambah beban panjang bagi Myanmar dalam hal pembangunan ekonomi, dimana pada tahun 2009 UNDP menggolongkan Myanmar masuk dalam kategori negara terendah se-Asia Tenggara

#### Tingkat pertumbuhan di Asia Tenggara

	Myanmar	Tertinggi di Asia Tenggara	Terendah di Asia Tenggara	Rata-rata di Asia Tenggara
GDP Perkapita	\$ 1.200	\$ 50.100 ( Brunei)	\$ 1.200 (Myanmar)	\$ 2.400
Tingkat Pengangguran	4,9 %	\$ 40 % ( Timor leste )	1,6 % (Thailand)	4,2 % (tidak termasuk Timor Leste)
Tingkat Kemiskinan	32,7 %	42 % (Timor leste)	51 % (Thailand)	26 %

Sumber : United Nation, "Human Development Index Report 2009", [www.undp.org](http://www.undp.org)

Statistik ekonomi Myanmar tidak mudah didapatkan sejak tahun 1997, para jenderal bahkan tidak mempublikasikan anggaran dasar negara yang formal, dan angka-angka yang mereka berikan tidak dapat dipercaya. Statistik-statistik yang tersedia menunjukkan kesengsaraan rakyat Myanmar yang sangat parah, dan juga rendahnya perkembangan ekonomi. Dari populasi yang mendekati 50 juta, ada 29 juta pekerja, tetapi 70% dari pekerja ini bekerja di pertanian. 50% GDP datang dari pertanian, dan hanya 15 % datang dari industry. Dan pengangguran diperkirakan di atas 10 %. Perkapita pada tahun 2006 adalah US\$ 1800. Menurut perkiraan IMF pertumbuhan rata-rata GDP Myanmar tahun 2007 sekitar 5,5 %, meskipun laporan resmi pemerin

Gelombang protes masyarakat yang lebih besar terjadi pada bulan September tahun 2007 melalui Revolusi Saffron yang dipimpin oleh ribuan Biksu yang berpakaian oranye serupa *saffron* bersama anggota NLD dan para aktifis mahasiswa di kota Yangoon. Revolusi Saffron merupakan klimaks dari rentetan protes panjang rakyat Myanmar sejak Pemerintah memangkas kebijakan subsidi dan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 500% pada 15 Agustus 2007. Kebijakan Pemerintah dalam menaikkan harga BBM tanpa adanya sosialisasi sebelumnya ini menciptakan gelombang panik rakyat Myanmar. Banyak rakyat miskin yang mendatangi tempat para biksu untuk meminta makan. Hal ini yang membuat para Biksu turun kejalan meminta keadilan bagi rakyat miskin dan menuntut agar tokoh gerakan pro demokrasi Aung San Suu Kyi dibebaskan.

Tuntutan masyarakat yang tergabung dari para Biksu , mahasiswa dan masyarakat minoritas maupun mayoritas Burma sangat berpengaruh pada perubahan demokrasi yang terjadi di Myanmar. Selama Revolusi Saffron tantangan politik kepada pemerintah Myanmar tidak terbatas pada etnis Burma atau daerah perkotaan dan pusat. Komposisi beragam oposisi politik tercermin dalam pimpinan NLD dan kelompok politik lainnya . Etnis minoritas selalu melihat diri mereka memiliki saham penting dalam struktur politik dan situasi di Myanmar sehingga dukungan yang diberikan sangat penting untuk melawan pemerintah militer. paling tidak perlindungan terpisah dan kepentingan kolektif mereka sendiri. banyak etnis minoritas adalah anggota atau pendukung NLD yang berpartisipasi dalam pemilu 1990, pemilu 2010 dan pemilu 2015. dukungan mayoritas etnis Burman terhadap gerakan pro demokrasi memberi kemenangan mutlak bagi partai NLD pada Pemilu 1990. NLD memenangkan 80% suara atau sekitar 392 kursi dari total 489 kursi yang tersedia di Pemerintahan. Rezim militer menolak hasil Pemilu ini dan menganggap Pemilu yang digelar tidak sah. Hal ini menimbulkan protes besar dari masyarakat Myanmar khususnya pendukung NLD dan semakin melegitimasi kediktatoran rezim militer Myanmar.

### **Adanya Tekanan Internasional terhadap pemerintahan Junta Militer.**

Gerakan perlawanan “8888” menjadi awal sorotan masyarakat menjadi internasional terhadap Myanmar. Pada peristiwa tersebut junta militer secara brutal menumpas demostran pro demokrasi yang berakhir dengan pembunuhan ratusan demostran bahkan ada yang mengatakan sekitar 3000 demostran termasuk

para biksu. (Kompas, 2007) Aksi demonstran tersebut salah satunya di picu oleh kondisi perekonomian Myanmar yang semakin buruk. Demonstrasi tersebut di jadikan sebagai sebuah pesan dari rakyat Myanmar terhadap rezim militer yang berkuasa agar dapat membawa Myanmar pada kehidupan sosial politik yang lebih baik.

Dalam hal melakukan tindakan represif kepada para lawan politiknya, junta militer tidak segan-segan untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap mereka diantaranya adalah melakukan penganiayaan fisik dan mental, menangkap dan bahkan mengasingkan mereka dari keluarga dan orang-orang terdekat. Hal ini salah satunya di alami oleh pejuang demokrasi dan hak asasi manusia yang di tangkap oleh penguasa militer sejak 20 Juli 1989 meski akhirnya di lepaskan pada tanggal 20 Juli 1995. Namun kembali di kenakan tahanan rumah di Yangoon pada tahun 2002 yang kemudian dipindahkan ke penjara insein. (Kompas, 2007) Konsepsi Myanmar terhadap keamanan domestik yang berlebihan akhirnya menciptakan penguatan rezim, kesatuan nasional dan kepatuhan hukum sebagai fokus dari aktivitas keseharian dari penguasa militer tersebut.

Kekawatiran internasional terkait dengan suramnya perkembangan politik domestik dengan penegakan demokrasi dan HAM di Myanmar. Pelanggaran HAM yang telah di lakukan oleh junta militer ini terkait dengan beberapa hal antara lain adalah penolakan junta militer untuk menerima hasil pemilu 1990 yang seharusnya mengantarkan Suu Kyi ke puncak kekuasaan sipil Myanmar, dapat di artikan sebagai pelanggaran HAM oleh junta militer terkait dengan Pasal 21 Ayat

1, Deklarasi Universal Hak Hak Asasi Manusia 1948 ( DUHAM) dimana pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang berperan serta dalam pemerintahan negaranya.

Dari serangkaian pelanggaran yang di lakukan junta militer, menarik perhatian dunia internasional dan protes terhadap junta militer dalam bentuk jatuhkan sanksi terhadap pemerintahan junta militer. Sanksi yang di jatuhkan berasal dari beberapa negara yaitu:

### **Tekanan Amerika Serikat terhadap Myanmar**

Embargo Amerika Serikat terhadap Myanmar telah berlangsung sejak tahun 1988. Sanksi yang di jatuhkan antara lain :

- a. Larangan transaksi keuangan antara AS dan Myanmar
- b. Larangan impor barang-barang Myanmar ke AS
- c. Sanksi individu terhadap presiden Thein Sein dan ketua parlemen
- d. Pembekuan visa pejabat Myanmar
- e. Pembekuan asset yang ada di lembaga keuangan AS
- f. Embargo senjata.

Sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat terhadap Myanmar ini secara otomatis melemahkan sendi-sendi perekonomian Myanmar. Akan tetapi dampak dari sanksi ini yang dijatuhkan oleh AS ini sebetulnya tidak begitu dirasakan oleh kelompok konglomerat militer Myanmar, dampaknya justru dirasakan oleh rakyat kecil. Akibat embargo AS pada tahun 2003 sebanyak 64 pabrik tekstil Myanmar terpaksa ditutup dan puluhan ribu karyawannya kehilangan pekerjaan.

Kebanyakan karyawan pabrik tekstil ini terdiri dari wanita-wanita muda yang merupakan tulang punggung ekonomi keluarga. AS secara bertahap mulai mengurangi sanksi terhadap Myanmar sejak tahun 2011, ketika Myanmar menyelenggarakan pemilu yang di klaim demokratis. Presiden Thein Sein di anggap lebih kooperatif daripada penguasa-penguasa militer pendahulunya dan komitmen dalam menciptakan situasi politik yang lebih demokratis ditunjukkan dengan pembebasan secara berkala tahanan-tahanan politik Myanmar di masa lalu, termasuk pembebasan penuh Aung San Suu Kyi sebagai tahanan rumah. Pencabutan sanksi-sanksi ini merupakan bentuk dukungan AS terhadap reformasi politik Myanmar. Hubungan bilateral AS dan Myanmar hingga saat ini masih difokuskan pada isu hak asasi manusia dan proses demokratisasi di Myanmar.

### **Tekanan ASEAN terhadap Myanmar**

ASEAN sebagai organisasi regional yang memiliki prinsip dan tujuan Deklarasi Bangkok, yang diantaranya isi dari prinsip dan tujuan tersebut mengenai; menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional dan identitas nasional setiap Negara, hak setiap Negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas dari campur tangan, subversive atau koersi pihak luar, tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama Negara anggota, penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan damai, menolak penggunaan kekuatan yang mematikan, kerjasama efektif antar



ASEAN adalah organisasi yang menganut prinsip Non-Intervensi. Tak dapat dipungkiri, prinsip Non-Intervensi yang selama ini dijunjung tinggi telah banyak memberi kontribusi terhadap eksistensi ASEAN.

Pernyataan Thein Sein ini menghadang ambisi sejumlah komunitas internasional, termasuk PBB dan Uni Eropa yang berniat menekan Myanmar agar segera mengakhiri konflik dalam negerinya, yaitu dengan cara penjatuhan sanksi terhadap Myanmar, termasuk pencabutan Myanmar dari organisasi ASEAN, karena konflik yang masih berkejolak di negeri junta militer itu mengundang usulan agar keanggotaan Myanmar di cabut dari ASEAN. Akan tetapi para pemimpin ASEAN sendiri lebih mendukung Myanmar ketimbang mengamini desakan komunitas internasional. ASEAN membentuk Inter-parliamentary Myanmar Caucus (AIPMC) pada tahun 2004. AIPMC merupakan organisasi non pemerintah yang anggotanya bersal dari anggota parlemen negara-negara anggota ASEAN. Organisasi ini memiliki misi membantu perkembangan demokrasi di Myanmar melalui proses mediasi perundingan dan kampanye.

ASEAN tidak mengenal mekanisme pencabutan keanggotaan sehingga organisasi regional itu tidak bisa menempuh langkah demikian terhadap Myanmar. Oleh karena itu, ASEAN sepakat tidak akan mencampuri urusan dalam negeri Yangon. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa ASEAN harus secepatnya melakukan langkah konkrit walaupun prinsip non-intervensi merupakan kendala awal dalam melakukan tindakan penekanan terhadap Myanmar agar bisa demokrasi terhadap rakyat dan tidak otoriter. Dengan ini, ASEAN sebagai suatu organisasi regional mempunyai tujuan melindungi kepentingan negara-negara

anggota ASEAN dapat ikut berperan memberikan dukungan kepada Myanmar untuk melakukan demokratisasi di negaranya. ASEAN menerapkan kebijakan pendekatan kondusif, kebijakan yang telah diterapkan ASEAN terhadap Negara Myanmar masih merupakan pendekatan terbaik. Untuk itulah ASEAN menganggap perlu dilakukan tekanan positif dengan menggunakan eksistensi Myanmar dalam keanggotaan ASEAN dan ini merupakan kunci pemacu upaya tersebut. Selain itu, diharapkan Myanmar dapat bersikap lebih akomodatif dan mulai melakukan perbaikan-perbaikan diberbagai bidang tanpa terasa disudutkan (Herjono, 2010)

### **Tekanan dari Perserikatan Bangsa Bangsa**

Negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada 19 April ini, pernah mendapat peringatan keras dari Dewan Keamanan PBB pada tahun 2007. Hal ini disebabkan karena pemerintah junta melakukan penindasan dan penumpasan keji yang dilakukan terhadap aksi unjuk rasa damai. Dalam pernyataan tersebut, PBB juga menyerukan junta militer untuk melakukan pembebasan terhadap tahanan politik serta seruan agar rezim itu bersedia untuk melakukan dialog dengan para tokoh-tokoh pro demokrasi yang di tahan, terutama Aung San Suu Kyi demi terciptanya perdamaian nasional.

### **Tekanan dari Negara Uni Eropa**

Dengan melihat banyaknya kasus yang dilakukan oleh junta militer, Uni Eropa segera memberlakukan berbagai sanksi keras terhadap Myanmar. Sanksi tersebut antara lain;

1. Pembekuan asset milik pejabat junta militer
2. Pelarangan berkunjung ke Uni Eropa
3. Sanksi dalam perdagangan dan keuangan antara Uni Eropa dan Myanmar
4. Embargo senjata

Hubungan Uni Eropa dan Myanmar sempat memanas saat Myanmar bergabung dengan ASEAN pada tahun 1997, saat itu junta militer masih berkuasa. Saat Myanmar akan menjadi ketua ASEAN 2006, Uni Eropa juga mengancam ASEAN bahwa ia akan memboikot pertemuan ASEAN dengan Uni Eropa.

### **Adanya Dukungan Internasional**

Perubahan yang terjadi di Myanmar sangat menarik perhatian dunia internasional. Berbagai sanksi yang di berikan sebelumnya mulai di cabut dan digantikan dengan berbagai dukungan agar demokrasi di Myanmar tetap berjalan lebih baik.

### **Uni Eropa**

Uni eropa menyatakan akan mendukung rakyat Burma dalam tiga hal:

*Pertama*, meningkatkan dan memberikan bantuan dana dalam bidang kemanusiaan, bahkan Uni Eropa telah memberikan 30 juta Euro bantuan. Misalnya dana 3D dalam menyediakan obat antivirus dan bagi seratus ribu pasien di Myanmar, karena setidaknya ada empat puluh ribu penduduk Myanmar memerlukan obat-obatan. Selain itu, Uni Eropa juga membantu menanggulangi meningkatnya tekanan ekonomi dan sosial yaitu dengan cara mengurangi tingkat

kemiskinan, populasi pengungsi, bahkan para pekerja imigran harus dibatasi jumlahnya. Dewan keamanan menyebutkan hampir 3-5 juta imigran Myanmar bekerja di Thailand, serta bersama ratusan ribu pekerja di India, Bangladesh, Srilangka, Indonesia dan lain-lain. Kini diperkirakan setidaknya ada 10% jumlah penduduknya berasal dari Myanmar. Jika ingin memperbaiki demokrasi di Myanmar, maka perlu terlebih dahulu mengatasi masalah serius ini, yaitu dengan membatasi kekuatan militer dan menjangkau lebih

*Kedua*, sangatlah penting untuk segera memperluas bantuan dalam bidang hak asasi manusia dan demokrasi terhadap masyarakat Myanmar. Seperti saat kampanye oleh gerakan demokrasi Myanmar untuk menggugat referendum pada bulan Mei 2008 dan rencana diadakannya pemilu 2010, haruslah didukung dengan adanya transformasi konflik, pendidikan demokrasi, mendukung adanya media independen, pengembangan partai-partai maupun organisasi politik, kampanye pemilu, tata pemerintahan yang baik, gencatan senjata dan rehabilitasi para pejuang, masyarakat sipil dan berbagai program pemberdayaan lainnya. Dengan cara-cara inilah, akan ditemukan cara dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di Myanmar. banyak dukungan dari manapun itu.

*Ketiga*, melanjutkan upaya-upaya membangun sebuah *consensus international* di Burma. Uni Eropa menunjuk perwakilannya Piero Fassino sebagai utusan dari Uni Eropa untuk Burma yang mendukung upaya PBB Ibrahim Gambari untuk menyelesaikan masalah di Myanmar. Uni Eropa juga memiliki sebuah proyek dalam membantu etnik minoritas yang tinggal diperbatasan Myanmar. Ini dibuktikan dalam salah satu *statement* yang dikeluarkan perwakilan

Uni Eropa di Bangkok. Menurut kepala Komisi Uni Eropa untuk Thailand dan Myanmar, Duta Besar Klauspeter Schmollenbach, menyatakan bahwa proyek Uni Eropa di Myanmar dimotivasi dari rasa keprihatinan kemanusiaan. Dari keseluruhan total bantuan Uni Eropa senilai 9,2 juta Euro, terdapat 1,2 juta Euro diperuntukkan bagi *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)*, khususnya bagi rencana pendidikan pengungsi etnik Karen dan lainnya senilai 510.000 Euro akan diberikan dalam bidang kesehatan, sama halnya yang diluncurkan oleh organisasi internasional lainnya untuk membantu memindahkan 20.000 penduduk etnik Shan.

Masyarakat Eropa melalui Duta Perancis George Sidre memprotes keras terhadap peristiwa pembantaian 18 September 1988, mereka mendesak pihak pemerintah militer untuk memberikan kebebasan kepada aktifitas rakyat dan kelompok oposisi sebagai realisasi hak hidup setiap manusia sebagai warga negara. (Jakarta Post, 1989)

## Referensi

- Wang Guangya. (2007, oktober 5). *statement on myanmar at the united national security council*. Retrieved februari 4, 2016, from china-un: [www.china-un.org](http://www.china-un.org)
- A.S.Hikam. (1999). *Demokrasi dan Civil Society*. LP3ES.
- AIMPMC. (2006). Daw Aung San Suu Kyi. *a tribute and call for freedom on her 60 Birthday* (p. 6). Kuala Lumpur.Malaysia: AIPMC.
- Alfian. (1973). *tingkah laku politik*. jakarta: leknas.
- Amnesty Internasional. (2004). *Myanmar: The Rohingya Minority: Fundamental right denied*. London: Amnesty International.
- Aryanto, H. (2013, september 27). *kondisi faktual muslim rohingya di indonesia*. Retrieved februari 16, 2016, from [indonesia4rohingya.org](http://indonesia4rohingya.org)
- Asia Yearbook. (1989).
- Asia Yearbook. (1989). *far easten economic* .
- Asian Survey. (1988). *Burma watcher*. burma: asian survey.
- BBC . (2010, maret 9). *Birma pilih komisi pemilu*. Retrieved februari 10, 2016, from BBC: [www.bbc.com](http://www.bbc.com)
- BBC. (2012). *Aung San Suu Kyi*. myanmar: bbc indonesia.
- BBC. (2012, september 30). *suu kyi berpotensi menjadi presiden burma* . Retrieved februari 25, 2016, from [www.bbc.com](http://www.bbc.com)
- BBC. (2013, maret 27). *suu kyi hadir parade militer*. Retrieved maret 27, 2016, from [bbc indonesia: www.bbc.com](http://bbc.com/indonesia)
- Bodreau, v. (2004). *Resisting Dictatorship*. Cambridge university.
- Budiarjo, M. (2008). *dasar-dasar ilmu politik*. jakarta: gramedia pustaka utama.
- Callahan, M. P. (2009). *Myanmar's Perspectual Junta: Solving the Riddle of Tatmadaw's Long Reign*. new left review .
- Choirunisa, F. (2014, oktober 29). (a. y. science, Interviewer)
- Choirunisa, F. (2015). *Peranan Aung San Suu Kyi dalam transisi demokrasi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

- Clark, A. L. (2003). *Burma in 2002. A year of transition* , 128.
- D.Rennald, R. (1990). *the karen rebellion in burma*. london: pinter.
- Daniel, L. (1993).
- Dewi, U. S. (2009). *myanmar negeri sang junta militer. KOMMAHI* ,  
www.ummy.wordpress.com.
- Dw. (2012). *myanmar gelar pemilu*. myanmar.
- Edward, F. (1973). *The armed Buereaucrat : Military Administrative Regime and Political Development*. Boston: Houghton Muffin Co.
- F. Sugeng Istanto, S. (1998). *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Firman, M. A. (2010). *prospek demokrasi di myanmar*. Retrieved januari 5, 2016, from theglobal:[http://www.theglobalreview.com/content\\_detail.php/lang=id&id=93&type=3](http://www.theglobalreview.com/content_detail.php/lang=id&id=93&type=3)
- Firnas, M. A. (2003). *prospek demokrasi di myanmar* . *jurnal universitas paramadina* , 130.
- Herjono, M. (2010). *Pelaksanaan Non-Intervensi di ASEAN* . Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas islam indonesia.
- Houtman, G. (1999). *democracy, the demise of socialism and aung san amnesia*. Tokyo: ILCC.
- Houtman, G. (1999). *freedom from fear*. tokyo: ILCAA.
- ICG . (2010). *the role of civil socity*. Brussel.
- Jakarta Post. (1989). jakarta.
- Jakarta post. (2013).
- Jepperson, R. L. (1996). *Norms, Identity,Culture in National Security*. New York: Columbia University Press.
- Kartini. (1999).
- KEDUBES RI. (2002). *sang merah putih di tanah pagoda. kenangan masa kini dan harapan* , 73.
- Keller, B. (2012). *a conversation with president U Thein Shein of myanmar*. new york: the new york times.
- Komnas HAM. (2007). *HAM. jurnal ham* .

- kompas. (1991).
- Kompas. (1991).
- Kompas. (2003). *catatan akhir tahun myanmar*. Kompas.
- Kompas. (2005). *etnis minoritas myanmar masih menjadi target kekerasan*. Kompas.
- Kompas. (2007). *lonceng kematian*.
- Kompas. (2009). *Quo vadis penegakan HAM ASEAN*. Jakarta: Kompas.
- Korsi, D. (2010). *European Union*.
- Kyi, A. S. (1995). *Freedom from fear and other writing*. England: Penguin Books.
- Kyi, A. S. (1993). *myanmar*. Myanmar: Pustaka Utama Grafiti.
- Leifer, M. (1995). *dictionary of the modern politics of south east Asia*. New York: Routledge.
- Liliansa, D. (2013). *hak kewarganegaraan etnis rohingya. mencegah dan mengurangi keadaan tanpa kewarganegaraan*.
- Lintner, B. (1948). *Burma in revolt*. Bangkok: Silkworm Book.
- Lintner, B. (1989). *Outrage Burma's Struggle for democracy*. Hongkong: 194.
- Lintner, B. (1989). *outrage burma's struggle for democracy*. Hongkong: Company Ltd.
- Luhulima, C. (2005). *isu kepemimpinan myanmar dalam ASEAN*. Jakarta.
- M.B.Pedersen. (2008). *the challenges of transition in myanmar*. Pasir Panjang.
- M.Smith. (1994). *ethnic groups in burma*. London.
- Martin. (2010). *implication of the new constitution an election. burma's april parliamentary*, 8.
- Martin, M. (2010). *Burma's 2010 elections: implication of the new constitution and election laws. congressional research service*, 6.
- Mas'oe'd, M. (2001). *Perbandingan Sistem Politik*. Gajah Mada University Press.
- Mochtar Mas'oe'd, C. M. (2001). *Perbandingan Sistem Politik*. Gajah Mada University Press.
- Mochtar Mas'oe'd, C. M. (2001). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- N.Shaw, M. (2001). *International Law*. United Kingdom: Cambridge University Press.



- Nasution, A. B. (2006). *Instrumen Internasional Pokok HAM*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Newsokezone. (2012). *pemilu myanmar*.
- Okamoto, I. (2013). Comment "Toward Myanmar's New Stage of Development: . In *Transition from military rule to the market* (pp. 120-121).www.onlinelibrary.com.
- Ostergaard, A. (2009). *Burma*. denmark: closed country.
- Pattisahusiwa, R. A. (2007). Pretorianisme dalam myanmar. *dominasi militer atas myanmar* , 27.
- Pedersen, M. (2008). *the challenges of transtition in myamar*. Suotheast asia.
- Pelita. (1991).
- Pelita. (1991).
- Pohan. (2008). isolasi. 3.
- Potter, D. (2000). *Democratization*. Cambridge: Open University Press.
- Pramono, A. (2010). *Peran UNHCR Dalam Menangani Pengungsi Myanmar Etnis Rohingya di Bangladesh*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- R.H.Taylor. (1991). myanmar 1990 new era or old. *South east asian affairs* , 199.
- Rahmanto, A. B. (2002). *tantangan gerakan demokrasi di myanmar*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- razuki, T. G. (2010, february 6). *kenangan tugas di KBRI Yangoon myanmar*. Retrieved february 15, 2016, from Tamgun: www.tomgun.com
- Riff, M. A. (1995). *Kamus Ideologi Politik Modern*. Yogyakarta: pustaka pelajar.
- Riswandi, S. D. (1995). *Kerja sama ASEAN : Latar belakang, perkembangan dan masa depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rizkisaputo. (2009). *kasus muslim rohingya*. Retrieved april 12, 2016, from wordpress: www.wordpress.com
- Sakhong, L. H. (2003, oktober 25). *Non-violet strategy for democracy movement in burma*. Retrieved february 23, 2016, from burmatoday: www.burmatoday.com
- Sari, Y. P. (2010, november 11). *Aung san suu kyi pejuang demokrasi myanmar*. Retrieved february 12, 2016, from media indonesia: http://www.mediaindonesia.com

- severino, R. (2009). *Asia Policy Lecture*. Australia: University of Sidney.
- Simamora, R. L. (2013). *Peran Amnesti Internasional dalam Pembebasan Aung San Suu Kyi*. Universitas Mulawarman.
- Soetjipto, A. W. (2015). *HAM dan Politik Internasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Solopos. (2012). *kisah demokrasi dan kehidupan para biksu*. solopos.
- Srijanti. (1998). *Etika Berwarganegara*. Jakarta: Salemba.
- Sriwibowo, S. (1993). *Aung San Suu Kyi Bebas Dari Ketakutan*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Steinberg, D. I. (2010). *Burma. what every want to know* , Oxford University Press.
- Steinberg, D. I. (1989). *Crisis in burma - statis and change in political economic turmoil*. bangkok: ISIS.
- Suara Merdeka. (2001).
- Suara Merdeka. (2001).
- Suara pembaruan. (2011). *pemerintah myanmar terbentuk, junta militer di bubarkan*. Retrieved from [www.suara.pembaruan.com](http://www.suara.pembaruan.com)
- Suharko. (2006). *Gerakan Baru Indonesia. Repretoar Gerakan Petani* , 3.
- Sukma, R. (2003). *Menuju Masyarakat Keamanan ASEAN*. Jakarta: CSIS.
- Suryokusumo, S. (1997). *studi kasus hukum organisasi internasional*. bandung: PT. Alumni.
- Tarrow. (1998). *Power in Movement, Social Movement and Contentius Politics*. Sidney: Cambridge University Press.
- Taylor, R. H. (2013). *Southeast Asian Studies. Myanmar In 2012* , 191-203.
- Tempo. (1993).
- Tempo. (2011).
- The jakarta Pos. (1989).
- UNDP. (2009). *integrated household living condition survey in myanmar*. Retrieved April 12, 2016, from undp: [www.undp.com](http://www.undp.com)
- Utami, M. P. (2016). *catatan perjalanan pemantauan pemilihan umum*.

- Viva News. (n.d.).
- Vivanews. (2013). *asean sambut baik penanggulangan sanksi bagi myanmar*.
- Wangke, H. (2005). ASEAN dan masalah kepemimpinan myanmar . 57.
- Wibisono, A. N. (2012). konflik myanmar. *konflik etnis rohingya dan rakhien* .
- Wilson, M. S. (2008). *Dictatorship and Decline in Myanmar*. Australia: pinter.
- Wilson, M. S. (2008). *Dictatorship and Decline in Myanmar*. Australia: Australia.
- Wordpress. (2008). Retrieved from [www.wordpress.com](http://www.wordpress.com)
- wordpress (Director). (2009). *All Burma Monks alliannce* [Motion Picture].
- World Report. (2014). *human right watch*.
- Worldpress. (2006). *berencana pulihkan hubungan diplomatik dengan myanmar*.
- Xiao, R. (2011). Positioning Norm Principle and interest in Chinese foreign policy the case of myanmar issue,. *pringer jurnal online* , 3-6.
- Xinhuanet. (2007). *Myanmar appoints new PM*. english: xinhuanet.
- Xinhuanet. (2012). *president U thein sein re-elected as myanmar's*. english: xinhuanet.